

**POLITIK SUBALTERN 'STRATEGI VINOLIA WAKIJO SEBAGAI
AKTOR INTERMEDIARY DALAM MEREPRESENTASIKAN
WARIA DAN PENGAKUAN ATAS GENDER KETIGA'**

Leonardus J. Putra

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email: Leonardus@yahoo.com

ABSTRACT

This study wanted to see how Vinolia Wakijo or Mami Vin and NGOs Kebaya role as an actor in a non-electoral politics Intermediary is capable of being a representation of the rights of transvestites as citizens. of the State as well as other communities. This study uses the approach subaltern politics, political representation, as well as Pierre Bourdieu's theory of power. With qualitative research methods based ethnographic approach.

Transvestites as the subaltern is to assert and maintain the identity can not be separated from their ability to obtain, expand and maintain the identity as real evidence in the social representation. So that they can be recognized and release the "clothes" minority. Discrimination is very closely linked to prejudice against transgender people. Prejudice against transgender community itself comes from the negative behavior of the transvestites. Transgender community as part of marginal groups experiencing the pressures of emphasis.

Recognition of the existence of transsexuals as a third gender (beyond male and female) was only obtained by certain transvestites, especially transvestites who have achievement and also the elite of the transvestites. Such an example of what is in the NGO Kebaya, in recognition of transsexuals as a third gender is only obtained by Mami Vin. Mami Vin is no longer ever get discrimination from society. Now Mami Vin is regarded as being a "MOM" than transvestites, pimps Vin can easily interact with the community and the State without any fear. Because he believes has been accepted in society. It mami Vin get not only because of achievement and consistency as a representation of transvestites in the prevention and spread of HIV / AIDS virus among transvestites, but rather it comes from him who is able to show a different side of transvestites in general.

Keyword:

ABSTRAK

Studi ini ingin melihat bagaimana Vinolia Wakijo atau Mami Vin dan LSM Kebaya berperan sebagai aktor non electoral dalam Politik Intermediary yang mampu menjadi representasi akan hak-hak para waria sebagai warga Negara. dari Negara dan juga masyarakat lainnya. Studi ini menggunakan pendekatan politik subaltern, politik representasi, dan juga teori kekuasaan Pierre Bourdieu. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan etnografi.

Waria sebagai kaum subaltern ini dalam menegaskan dan mempertahankan identitas tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk memperoleh, memperluas dan mempertahankan identitas tersebut sebagai bukti

nyata dalam representasi sosial. Sehingga mereka dapat diakui dan melepaskan “baju” minoritasnya. Diskriminasi tersebut sangat berhubungan erat dengan prasangka masyarakat terhadap kaum waria. Prasangka masyarakat terhadap kaum waria sendiri berasal dari perilaku negatif dari kaum waria. Komunitas waria sebagai bagian dari kelompok marginal mengalami berbagai tekanan dari penekanan.

Pengakuan akan keberadaan waria sebagai gender ketiga (diluar laki-laki dan perempuan) ternyata hanya didapatkan oleh waria tertentu, terutama waria yang memiliki prestasi dan juga para elite dari waria tersebut. Semisal contoh apa yang ada dalam LSM Kebaya, pengakuan atas waria sebagai gender ketiga hanya didapatkan oleh Mami Vin. Mami Vin tidak lagi pernah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Kini Mami Vin lebih dipandang sebagai sosok seorang „IBU“ ketimbang waria, mami Vin dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dan Negara tanpa ada rasa takut. Karena dia yakin telah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut mami Vin dapatkan bukan hanya karena prestasi dan konsistensinya sebagai representasi dari waria dalam penanggulangan dan penyebaran Virus HIV/AIDS dikalangan waria saja, melainkan justru datang dari dirinya yang mampu menampilkan sisi yang berbeda dari waria pada umumnya.

Kata-kata kunci : Subaltern, Politik Representasi, Dan Kekuasaan

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana Vinolia Wakijo atau Mami Vin dan LSM Kebaya berperan sebagai aktor non electoral dalam Politik Intermediary yang mampu menjadi representasi akan hak-hak para waria sebagai warga Negara. Terutama prihal diskriminasi dari ruang public yang selalu para waria dapatkan dari Negara dan juga masyarakat lainnya. Dan yang terakhir adalah, bagaimana mami Vin membangun kekuasaannya sebagai upaya dari nya untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan waria sebagai gender ke tiga dalam masyarakat dan Negara.

Kaum waria merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, baik di tinjau dari segi psikologis, sosial, norma, maupun secara fisik. Kehidupan mereka cenderung hidup bergelamor dan eksklusif atau

membatasi diri pada komunitasnya saja. Mereka sering terjerumus pada dunia pelacuran dan hal-hal lain yang menurut agama, aturan, dan nilai masyarakat menyimpang. Secara fisik memang menggambarkan mereka adalah laki-laki tetapi sifat dan perilaku menggambarkan wanita.

Permasalahan sosial yang dihadapi kaum waria di Indonesia termasuk sangat rumit dan kompleks karena berbagai faktor yang kurang mendukung dalam menjalani kehidupannya secara wajar baik yang diakibatkan oleh faktor intern sendiri seperti hidup menyendiri/hanya terbatas pada komunitasnya juga karena faktor ekstern seperti pendidikan terbatas, kemiskinan, ketidaktrampilan, diskriminasi baik dikalangan masyarakat umum maupun oleh keluarganya sendiri. Dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh kaum waria tersebut membuat mereka cenderung terjerumus pada hal-hal yang menyimpang seperti jadi pelacur, pengemis, pengangguran dan lainnya.

Akibat dari perilakunya tersebut berdampak pada masalah kesehatan/penyakit fisik, dan kehidupan sosial, seperti penyakit kelamin, kulit, HIV/AIDS, narkoba dan penyakit menular lainnya. Sedangkan secara sosial mereka terkucikan/didiskriminasi dari masyarakat maupun keluarganya sendiri, mengganggu ketertiban umum, pemalas dan lain-lainnya. Waria dapat kita simpulkan sebagai kelas identitas sosial baru (gender dan sexualitas) di luar kondisi normal yang selama ini bertahan dimasyarakat. Sebagai identitas gender, mereka berada pada ketidakjelasan antara laki-laki atau perempuan, secara sexualitas tentunya mereka juga berada pada keadaan yang dianggap kebanyakan masyarakat anggap tidak ‘Normal’. Bagaimanapun, mereka terbiasa untuk mengakui diri mereka sebagai seorang waria dari pada sebagai wanita.

Dalam study-study kontemporer saat ini keberadaan waria selalu berada pada kelompok kelas bawah yang sering mendapatkan penekanan dan diskriminasi oleh sebagian masyarakat dan yang paling utama adalah diskriminasi yang mereka dapatkan dari Negara. Keberadaan budaya dominan dengan dikotomi pria dan wanita menempatkan komunitas waria kedalam diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai tindakan yang berbeda dan kurang besahabat dari kelompok dominan atau anggotanya kepada anggota subordinasinya, (Liliweri, 2005:219).

Diskriminasi tersebut sangat berhubungan erat dengan prasangka masyarakat terhadap kaum waria. Prasangka merupakan sikap negative yang diarahkan kepada kelompok tertentu dan difokuskan pada ciri-ciri negatif. Prasangka masyarakat terhadap kaum waria sendiri berasal dari perilaku negatif dari kaum waria. Komunitas waria sebagai bagian dari kelompok marginal mengalami berbagai tekanan dari penekanan. Penekanan disini diartikan sebagai kondisi dan posisi yang membatasi ruang gerak waria untuk mengekspresikan identitasnya, Nancy Fraser (dalam Farrelly, 2004: 212-213).

Selain itu diskriminasi melalui kekerasan fisik dan penolakan khususnya ormas-ormas agama seperti FPI sangat sering dialami oleh para waria di Indonesia. Dari sudut pandang nilai humanisme universal, konflik yang diwarnai kekerasan sebagaimana yang dialami oleh para waria di indonesia memang sangat ironis. Di sisi lain, hadirnya negara pun tidak dengan serta merta mampu menyelesaikan konflik kekerasan yang banyak dialami oleh kaum waria. Dalam beberapa kasus, Negara sangat dibutuhkan sebagai pihak ketiga yang menjadi mediator antar pihak yang sedang berkonflik. Tapi ternyata, faktanya berkata lain,

Negara hanya seperti penonton saja, tidak jelas apakah Negara mendukung dan mengakui keberadaan kaum waria atau sebaliknya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, melalui penelitian ini kami mencoba menjawab pertanyaan:

“Bagaimana strategi Vinolia Wakidjo sebagai (aktor intermediary) dalam merepresentasikan waria dan pengakuan atas gender ke 3 ? Sehingga secara tidak langsung studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana Mami Vin membangun kekuasaannya dalam memperjuangkan Hak dan Kewajiban setiap waria sebagai warga Negara.

1.3. Kerangka Teori

Pola relasi kekuasaan memunculkan kaum yang mendominasi dan kaum yang didominasi. Hubungan antar kedua kaum dapat dilihat dari kuatnya pembangunan ideologi yang dilancarkan oleh kaum yang mendominasi terhadap kaum yang didominasi. Suatu ideologi dari kaum dominan mampu membentuk pandangan kaum minorita yang menekankan penerimaan secara damai. Hal ini disebut sebagai hegemoni kaum dominan terhadap kaum minoritas. Ekspresi kuasa ini tidak hanya ditunjukkan dalam ranah politik formal pemerintahan untuk melanggengkan dominasinya tetapi juga ditunjukkan olehsetiap interaksi sosial masyarakat. Setiap interaksi sosial memunculkan kaum minoritas dan kaum dominan. Kaum-kaum minoritas ini muncul disaat kuatnya hegemoni kaum dominan sehingga menimbulkan lemahnya akses terhadap ranah publik.

Munculnya bahasan mengenai kaum minoritas tidak terlepas dari berbagai gagasan dan teori yang membentuknya. Teori poskolonial, identitas dan politik

identitas, Marxisme, dan feminism adalah sebagian gagasan yang mempengaruhi pola relasi kuasa yang mengukuhkan kaum dominan dan kaum minoritas. Salah satu kajian mengenai kaum minoritas adalah *subaltern*. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan sekelompok orang yang termarjinalkan dan tereksklusi dalam ranah publik. Sehingga penelitian ini mengambil Politik Subaltern sebagai landasan teori dalam mengkaji strategi apa yang ditempuh oleh Vinolia Wakidjo dalam memperjuangkan kaumnya.

1.3.1. Identitas Waria Sebagai Subaltern

Berbicara tentang identitas tentunya kita tidak dapat melupakan banyak literatur yang melakukan kajian tentang identitas ini (baik politik ataupun sosiologi) telah melakukan kategorisasi atau pengelompokan identitas kedalam dua kategori utama, yaitu: *Pertama*, Identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas), dan yang *Kedua*, Identitas politik (nasionalitas dan juga kewarganegaraan). Identitas sosial lebih pada bagaimana posisi subjek atau seseorang di dalam relasi atau interaksi sosialnya. Sedangkan Identitas Politik yaitu bagaimana subjek atau seseorang dalam menentukan posisi mereka di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan. Menurut Setyaningrum (2005), dalam konteks dimana identitas dimobilisasi bagi kepentingan artikulatif, sehingga menjadi peluang bagi penciptaan dan klaim-klaim terhadap “Identitas Sosial-Politik Baru” yang sekaligus menciptakan peluang-peluang konflik terhadap pembentukan Identitas Baru tersebut.

Pendekatan pembentukan identitas berdasarkan *Konstruktifisme*, berdasarkan pada identitas yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang

kompleks. Pendekatan ini beranggapan bahwa identitas waria terbentuk atas dasar kategori sosial dan merupakan kesadaran cultural. Identitas waria sebagai bentuk konstruksi identitas baru inilah yang kemudian menjadi sumber konflik antara masyarakat dan waria, terlebih dalam hal usaha mereka untuk mendapatkan pengakuan dan kesamaan hak seperti masyarakat lainnya sebagai warga Negara. Perjuangan hak-hak atas diri mereka sebagai warga Negara menunjukan keyakinan para Waria sebagai bentuk eksistensinya, dan juga bentuk perlawanan mereka terhadap kehidupan yang sering tidak ramah kepada para waria yang lekat dengan ‘ketidak normalannya’.

Identitas politik di dalam konteks poskolonial berkenaan dengan representasi subjek atau kesadaran seseorang yang dikonstruksikan oleh berbagai aspek di dalam relasi sosial, seperti; kelas, gender, ras seksualitas, dan etnisitas. Kelas, ras, dan etnisitas, misalnya, dapat dikonspirasi untuk suatu proyek pembentukan identitas nasional. Gender juga memiliki pengaruh sinergis sebagai sumber imajer bagi konstruksi identitas nasional.

Oleh karena itu, identitas berawal dari sumber-sumber yang menentukan atau lokasi kita di dalam interaksi sosial, maka identitas bukanlah suatu objek atau substansi yang bersifat esensial, melainkan situasional, (Mendicta, 2003:408). Kata “Identitas” dan maknanya di dalam konteks politik, sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang cukup baru di dalam wacana intelektual kontemporer. Identitas seseorang ‘mengkonstruksikan suatu proses dialogis yang menandai batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain, (Stuart Hall, 1992).

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan seorang waria yang sekaligus sebagai pendiri LSM KEBAYA, ialah Vinolia Wakidjo. Informan yang sering disapa dengan sebutan mami vin ini, telah mempunyai segudang prestasi seiring dengan perjuangannya mendapat hak sebagai warga negara. Studi ini juga melihat bagaimana strategi mami vin sebagai aktor intermediary yang merupakan representasi dari kaum yang termarginalakan dan juga mewadahi lsm yang didirikannya sejak 2006. Kerja sama dengan berbagai yayasan dan donatur membuat lsm kebaya tetap bisa eksis hingga kini, dengan membawa visi misi mengurangi angka HIV/Aids pada kalangan waria.

Wawancara dilakukan dengan setting informal, karena langsung mendatangi kediaman mami vin, yang juga merupakan pusat LSM kebaya. Data yang terkumpul dari hasil wawancara selanjutnya ditranskrip dan dikategorikan berdasarkan tema-tema pertanyaan dalam *interview guideline* yang telah dibuat dan berdasarkan pada tema isu sentral yang dimunculkan dalam penelitian ini. Kategori tema dan isu inilah yang menjadi dasar analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

B. PEMBAHASAN

Berbicara tentang waria tentunya tidak dapat kita lepaskan dari awal mula pembentukan identitas mereka itu sendiri. Konstruksi identitas yang ada pada waria tentu tidak bersal dari waria itu sendiri, ada proses, ada konstruksi lain yang juga ikut andil dalam memproduksi identitas waria tersebut. Barulah kemudian konstruksi itu didapat dari berbagai pola interaksi yang dialami oleh para waria dengan aktor-aktor (identitas) lainnya. Konstruksi identitas

tersebutlah yang kemudian menjadi ciri utama bagi para waria sebagai identitas seksual yang abnormal.

Norma agama yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan semakin memperkuat stigma negative masyarakat terhadap waria, memperkuat anggapan masyarakat bahwa mereka ‘waria’ memiliki kelainan sexual yang harus diluruskan kembali. Sehingga tentunya ada konsekuensinya ketika seseorang menunjukkan identitas warianya di dalam masyarakat, maka waria tersebut akan dipinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena memang dalam masyarakat tidak mengakui keberadaan identitas mereka dalam kehidupan sosial mereka.

Selain itu pembentukan identitas yang mereka dapatkan juga yang terbesar berasal dari dalam dirinya, dari pergaulan dan kesehariannya. Artinya walaupun dilahirkan sebagai seorang laki-laki, namun sejak kecil mereka lebih menunjukkan sisi kewanitaannya. Mulai dari lebih sering bermain dengan perempuan, lebih suka memainkan permainan anak perempuan, dan bahkan memiliki ketertarikan pada anak laki-laki ketimbang perempuan. Memang ketika kecil mereka tidak sadar akan kelainan yang mereka miliki, namun ketika mulai dewasa para waria sudah mulai sadar akan kelainan yang ada dalam tubuh mereka. Mereka sudah mulai sadar bahwa mereka terjebak didalam tubuh yang salah, jiwa mereka perempuan namun fisiknya mereka ada di dalam tubuh perempuan.

Memang banyak sekali bagaimana konstruksi akan identitas waria itu dapat terbentuk, pergaulan dimasyarakat, ada rasa kecewa dengan lawan jenis, bahkan sampai ada yang sekedar ikut-ikutan yang justru menjadi nyaman akan

kondisi seperti itu. Proses pertama tadi menunjukan bahwa keberadaan waria sudah melekat dalam diri mereka sejak kecil ataupun tadi, hadir melalui pengalaman seksual mereka ketika tumbuh menjadi dewasa. Terlepas sejak kapan orientasiku seksual menyimpang tadi hadir, penegasan atas jati diri sebagai seorang waria tetap melalui proses yang panjang. Realitas ini sesuai dengan prespektif *Konstruktivisme* (Kinasih, 2005:17, dalam Widayanti 2009. Hal lain yang juga yang kemudian menjadi konstruksi pembentukan identitas waria yaitu berasal dari pekerjaan mereka, baik itu waria yang bekerja di Salon, bekerja sebagai PSK, bekerja sebagai pengamen, dan waria yang bekerja di sektor lainnya. (Widayanti, 2009)

Istilah *subaltern* mula-mula digunakan dan diperkenalkan oleh seorang Marxis Italia Antonio Gramsci sebagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Kelas *subaltern* di samping tertindas mereka juga tidak memiliki akses kepada kaum *elite* dan cenderung diabaikan. Oleh Antonio Gramsci istilah ini dijadikan indikator terhadap “*kaum inferior*”, entitas dalam masyarakat yang menjadi objek hegemoni “*kaum elite*”. Menurut Gayatri Chakravorty Spivak dalam tulisannya “*Can Subaltern Speak?*”, yang dimaksud *subaltern* adalah subjek yang tertekan, para anggota ‘klas-klas’-nya Antonio Gramsci, atau yang lebih umum mereka yang berada di tingkat inferior (Gandhi 2006, h. 1).

Dalam Oxford English Dictionary, istilah *Subaltern* sendiri memiliki tiga arti kata yang berbeda. Secara konvensional, ia dipahami sebagai sinonim dari subordinat, namun bias juga berarti pekerja kelas rendahan dalam ketentaraan. Dari pemikiran Gayatri Spivak tersebut ada satu *point* penting bahwa *Subaltern*

tidak bisa memahami keberadaannya dan tidak mampu untuk menyuarakan aspirasinya. Artinya bahwa perlawanan kelompok minoritas dalam sebuah universitas bukanlah sebagai *Subaltern* karena mereka mampu berbicara untuk menuntut apa yang menjadi bagian atau haknya. Spivak juga selalu menekankan bahwa *Subaltern* tidak memiliki ruang untuk menyuarakan tentang kondisinya, sehingga kau intelektual memiliki tugas untuk mewakilinya.

*Hidup sebagai waria itu sangat berat, sama seperti yang lain, mami dulu juga mendapatkan hinaan, diskriminasi, kekerasan bahkan sampai akan dibunuh. Konflik antar waria pun sering terjadi, biasanya konflik itu terjadi ketika ada waria lain yang lebih laris, yang lebih laku. Ya termasuk mami, walaupun tidak cantik, dulu waktu masih ‘nyebong’ pelanggan mami banyak.*¹

Subaltern memiliki dua karakteristik yaitu, adanya penekanan dan di dalamnya bekerja suatu mekanisme pendiskriminasian. Penting dari pendapat Spivak tersebut bahwa *subaltern* tidak bisa memahami keberadaannya dan tidak mampu untuk menyuarakan aspirasinya. Kaum *subaltern* tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisinya, sehingga perlu kaum intelektual sebagai “wakil” mereka.

Subaltern digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang-orang yang termarginalkan dan terekskusi dalam ranah publik sehingga mengalami tekanan, khususnya dalam perjuangan melawan hegemonik globalisasi. Marginalisasi yang

¹ Wawancara dengan Mami Vinolia Wakijo, LSM Kebaya, Yogyakarta, Kamis 13 Desember 2012

didefinisikan sebagai pengasingan dari sistem ketenagakerjaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial berdampak pada timbulnya perbedaan materi, pembatasan hak-hak kewarganegaraan dan hilangnya kesempatan untuk mengekspresikan diri, ciri ini melekat erat pada kaum *subaltern*.

Kaum subaltern ini dalam menegaskan dan mempertahankan identitas tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk memperoleh, memperluas dan mempertahankan identitas tersebut sebagai bukti nyata dalam representasi sosial. Sehingga mereka dapat diakui dan melepaskan “baju” minoritasnya. Oleh karena itu subaltern erat kaitannya dengan relasi kuasa dan politik. Kaum-kaum Subaltern Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari ranah publik dan tidak mampu menyuarakan kondisinya sebagai akibat kuatnya hegemoni dominan tidak berada jauh dari pandangan kita.

Stereotype yang dicanangkan kaum dominan menjadikan kaum subaltern sulit mengakses ranah publik. Perlakuan berbeda dan tindakan yang tidak menyenangkan dari kelompok dominan terhadap kelompok subaltern memunculkan perlawanan baik dari dalam kelompok sendiri maupun terhadap aktor lain yaitu lingkungan sekitar dan negara. Perlawanan telah ditunjukkan kaum-kaum subaltern seperti buruh, petani, waria, etnis Tionghoa di Indonesia, dan lain sebagainya.

Kaum subaltern yaitu mereka yang bukan elite dan kaum yang tidak bisa bicara karena tidak diberinya bahkan konstruksi “subyek” dalam wacana kolonialisme. Kaum subaltern juga adalah mereka yang selalu dalam posisi direpresentasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti politisi, birokrat, ilmuwan sosial, dan aktivis kemasyarakatan. Mereka tidak pernah bisa

merepresentasikan dirinya karena kurang memiliki akses bicara di arena publik. Kaum subaltern adalah kelompok yang selama ini selalu dalam posisi tidak berdaya (disempowered), tidak pernah bisa berbicara di media publik (disenfranchised), dan bersifat marjinal.

Kaum waria dapat digolongkan sebagai kelompok kelas bawah yang mengalami penekanan dan diskriminas dari kelas dominan. Terpinggirnya waria dari ranah publik berkaitan dengan identitas transeksual yang dimilikinya yang belum mendapat pengakuan dari masyarakat pada umumnya. Kondisi sosial masyarakat saat ini hanya mengakui identitas laki-laki dan perempuan. Budaya dominan masyarakat yang hanya mengakui identitas laki-laki dan perempuan menyebabkan kaum waria mengalami diskriminasi dalam kelompok masyarakat.

Diskriminasi yang dialami kaum waria berhubungan erat dengan stereotype dari masyarakat umum bahwa kaum waria dekat dengan hal negatif. Dalam hal ini penyimpangan seksualitas, penderita HIV/AIDS dan juga digolongkan sebagai komunitas yang memiliki tingkat pendidikan rendah yang tidak mempunyai ketrampilan selain berdandan. Kaum waria sebagai subaltern dipahami dengan melihat pendiskriminasian dari kelompok masyarakat lain. Diskriminasi dalam kaum waria terbagi kedalam diskriminasi langsung dan tidak langsung (Widayanti 2009, h. 25).

Waria sebagai subaltern tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Organisasi waria memiliki peran penting dalam mewujudkan pengakuan masyarakat terhadap identitas waria. Berusaha merubah paradigma negatif tentang waria menjadi yang lebih positif dalam kehidupan sosial. Upaya dilakukan dengan pernyataan dalam berbagai aktivitas diskusi baik formal

maupun non formal dengan masyarakat luas, dan juga melalui media tulisan untuk membuat suatu wacana. Selain elite waria, akademisi juga berperan dalam merepresentasikan identitas waria dengan melakukan penelitian dan kajiannya yang berpengaruh pada identitas waria.

Keberadaan budaya dominan dengan dikotomi pria dan wanita menempatkan komunitas waria kedalam diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai tindakan yang berbeda dan kurang besahabat dari kelompok dominan atau anggotanya kepada anggota subordinasinya, (Liliweri, 2005:219). Diskriminasi yang dialami oleh kaum waria terbagi atas dua macam, yaitu:

- a. Diskriminasi langsung berupa pembatasan bagi kelompok waria untuk mengakses wilayah tertentu seperti daerah permukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan semacamnya.
- b. Diskriminasi tidak langsung terjadi melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang menjadi pembatas kelompok waria untuk berhubungan dengan kelompok lain.

Diskriminasi tersebut sangat berhubungan erat dengan prasangka masyarakat terhadap kaum waria. Prasangka merupakan sikap negative yang diarahkan kepada kelompok tertentu dan difokuskan pada ciri-ciri negatif. Prasangka masyarakat terhadap kaum waria sendiri berasal dari perilaku negatif dari kaum waria. Komunitas waria sebagai bagian dari kelompok marginal mengalami berbagai tekanan dari penekanan. Penekanan disini diartikan sebagai kondisi dan posisi yang membatasi ruang gerak waria untuk mengekspresikan identitasnya, Nancy Fraser (dalam Farrelly, 2004: 212-213).

Idealnya, memahami Waria hendaknya dipahami secara utuh (holistik), baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang memiliki kelebihan dan berbagai kekurangan. Waria sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, didalamnya terdapat potensi-potensi yang memungkinkan dikembangkan kearah yang lebih membangun atau konstruktif bagi upaya untuk memberdayakan Waria dalam pembangunan bangsa. Disamping itu, pada sebagian waria juga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang biasanya berdampak pada ketidak keberfungsian sosialnya, misalnya gangguan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, mempertahankan hidup dengan cara yang menyimpang seperti melacurkan diri, mengamen dan menggelandang di jalanan dan sebagainya. Kondisi ini berdampak pada keteraturan sosial dan tatanan sosial masyarakat.

**Tabel 1
Identitas Seksualitas Waria²**

No	Identitas	Keterangan
1	Seks	Laki-laki
2	Gender	Feminim
3	Orientasi Seksual	Homoseksual

**Tabel 2
Karakteristik Identitas Kolektif Waria³**

No	Identitas Kolektif	Keterangan
1	Identitas Gender	Transgender
2	Penampilan dan	Penampilan berusaha seperti wanita.
	Keahlian	Keahlian minim dan pendidikan rendah
3	Pekerjaan	Nyebong (PSK)
4	Bahasa	Bahasa Prokem/ Bahasa Slang/ Bahasa Gaul

² Widayanti, 2009. Hal 42

³ Ibid, Hal 68

Sebagai subaltern kerberadaan waria yang tidak memiliki kekuatan dan juga posisi tawar kepada masyarakat dan Negara membuat kebanyakan dari mereka hanya bisa pasrah dan berdiam diri terhadap marginalisasi dan diskriminasi yang mereka dapatkan. Masih banyak waria yang mendaat penolakan dari masyarakat dan lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya, kekerasan verbal, dan bahkan kekerasan fisik sering kali mereka dapatkan. Dalam hal kekerasan fisik justru sering mereka dapatkan dari para ‘pelanggan’ yang menggunakan jasa mereka sebagai PSK. Mulai dari tidak mau membayar jasa yang waria berikan, hinaan-hinaan, pukulan, dan bahkan tidak pembunuhan. Sudah banyak kasus yang kemudian dilimpahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum, dan lagi-lagi kasus yang mereka alami tidak pernah ada titik terang penyelesaiannya.

Selain itu keterbatasan dan diskriminasi lain justru datang dari Negara yang seharusnya menjamin Hak dan Kewajibannya terhadap warga Negara. Waria masih sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan disektor formal, baik itu disektor pemerintah atau swasta. Hal ini menguatkan bahwa keberadaan waria sangat terpinggirkan dalam ranah publik. Negara dalam hal ini pemerintah sendiri belum tegas apakah keberadaan waria ini diakui secara formal atau tidak. Ketidak tegasan dari pemerintah inilah yang kemudian digunakan oleh masyarakat terlebih Ormas-ormas belatarbelakang agama untuk turun tangan langsung merajai dan juga melakukan tindakan represif dengan menggunakan kekerasan terhadap waria. Banyak sekali kegiatan-kegiatan waria yang

dibubarkan paksa oleh FPI dan Ormas lainnya dengan alasan melanggar kaidah norma agama.

Pemerintah hanya melakukan razia-razia terhadap waria yang sedang mangkal sebagai PSK dijalan, tentunya hal yang sama ketika pemerintah berhadapan pada PSK yang bukan waria (perempuan). Kebanyakan masyarakat pun masih secara tegas menolak keberadaan waria, selain karena kebiasaan dan kehidupan mereka yang melanggar norma agama dan sosial, pandangan atau stigma negatif juga berasal dari rendahnya pendidikan dan juga moral yang buruk. Hal tersebutlah yang kemudian membuat mereka bekerja sebagai pekerja seks (nyebong), menjadi pengamen, atau bekerja di salon-salon kecil.

Diskriminasi dan stigma negatif itu juga datang dari pekerjaan mereka sendiri, sebagai PSK tentunya mereka akan sangat rawan akan tertular penyakit atau virus HIV AIDS. Bahkan virus ini tidak hanya mengancam waria yang bekerja sebagai PSK, namun juga waria secara keseluruhan. Karena mamang kehidupan yang bebas, prilaku seks bebas yang membuat mereka sangat rentan terhadap HIV AIDS. Penyakit ini yang memang membuat para waria sangat ditentang, tidak hanya membahayakan dan mengancam kehidupan mereka (waria) saja, namun juga masyarakat lain yang melakukan interaksi langsung. Karena memang virus penyakit ini merupakan penyakit yang menular, walaupun memang penularannya tidak semudah penyakit menular lainnya, semisal contoh menular melalui hubungan sexual, jarum suntik, dll. Namun alasan inilah yang membuat masyarakat memilih menjauh dan menghindari mereka.

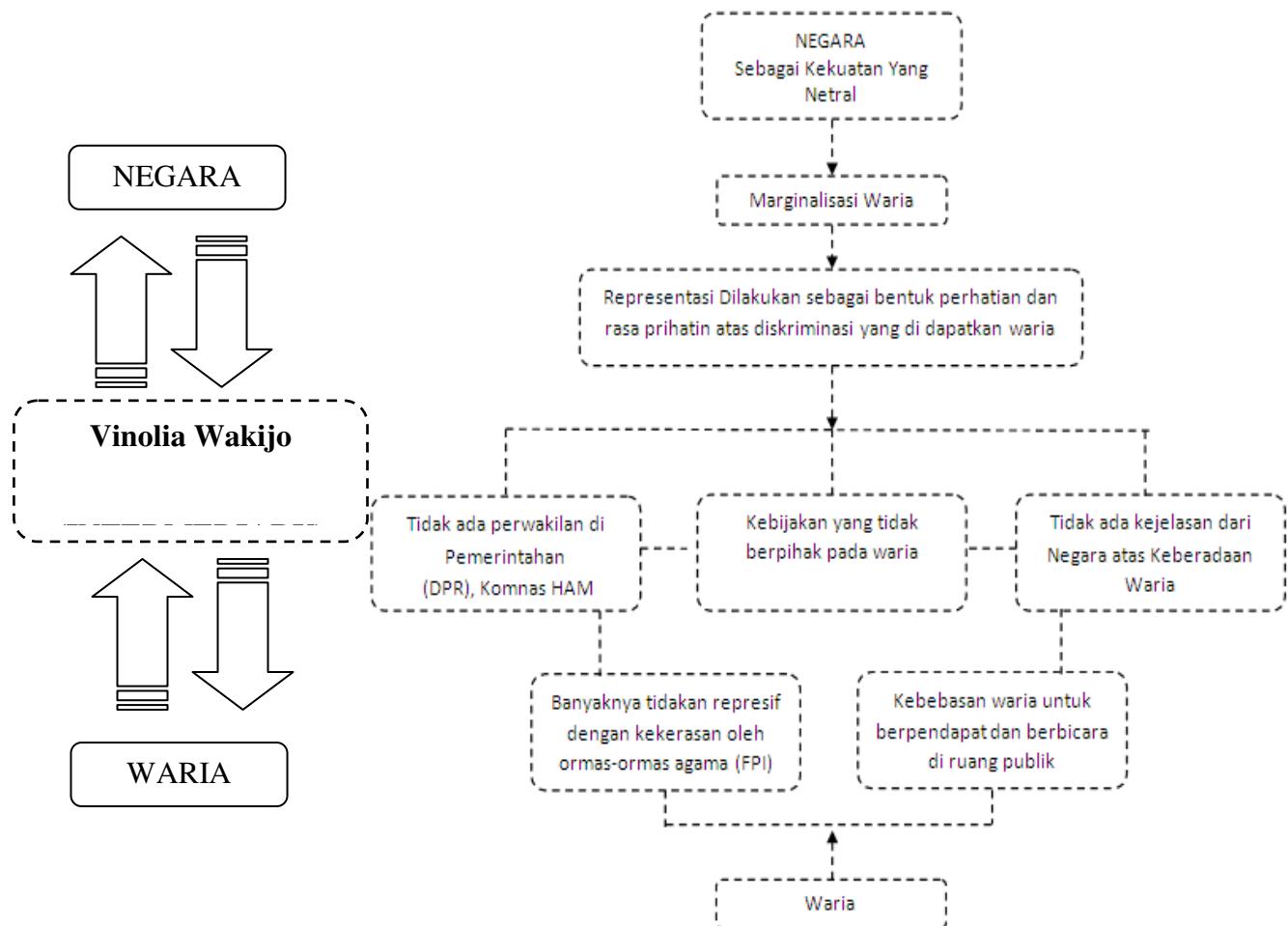
2.1. Vinolia Wakijo “Representation Of Waria Yogyakarta”

Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* 1967, memetakan beberapa kelompok besar representasi: *Formalistic Representation*, *Substantive Representation*, *Descriptive Representation*, dan *Symbolic Representation*.

- a. ***Formalistic Representation*** secara garis besar menekankan pada sebuah institusi yang mewadahi agen-agen yang mewakili konstituennya, baik itu mewakili konstituen di wilayah agen tersebut berasal maupun mewakili sebuah negara bangsa.
- b. ***Substantive Representation*** berbicara tentang seseorang yang mewakili orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, tanpa melihat siapa yang diwakilinya, dari wilayah mana mereka berasal, dan sebagainya. Kesamaan kepentingan merupakan pintu masuk dalam mengidentifikasi Substantive Representation ini.
- c. ***Descriptive Representation*** merupakan perwakilan agen-agen karena memiliki kemiripan dari yang terwakili, dan tujuan keterwakilan tersebut adalah upaya mereproduksi karakter baru dari yang diwakilinya, seperti isu gender, isu etnis, dan lain-lain.
- d. ***Symbolic Representation*** membahas tentang benda-benda yang mempunyai nilai keterwakilan yang tinggi atas sebuah kelompok/komunitas/rakyat sebuah negara bangsa.

Pola representasi yang banyak dilakukan oleh Mami Vin terhadap keberadaan dan diskriminasi waria dapat dilihat dan meminjam dari pemetaan kelompok besar dalam representasi yang dikonsepkan oleh Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation*. Dengan menggunakan *Descriptive*

Representation, kelompok representasi ini berangkat pada titik terpenting, yaitu adanya kemiripan dari yang mewakili maupun yang terwakili, baik itu kesamaan rasa, pandangan, dan latar belakang pribadi mereka masing-masing. Tujuan utama dari kelompok Descriptive Representation adalah mencoba memperjuangkan lahirnya karakter dan identitas baru dari waria, baik itu pada level nasional atau hanya pada lingkup-lingkup kecil dan lokal kedaerahan. Baik itu persamaan hak dan layanan dengan masyarakat ber-gender jelas (Pria/Wanita) pada umumnya, salah satunya dalam isu pencegahan dan penanganan waria yang mengidap virus HIV/AIDS. Sehingga apabila ada waria yang positif menderita HIV/AIDS maka dia akan mendapatkan layanan yang sama dan adil dengan masyarakat umum lainnya, dan yang terakhir adalah upaya mereka bersama untuk merubah stigma negative masyarakat terhadap waria, yang selama ini waria dianggap sebagai sampah masyarakat, sebagai perusak tatanan norma di masyarakat, sehingga nantinya para waria dapat diterima dengan baik di masyarakat. Sama seperti keberadaan Mami Vin (Vinolia Wakijo) sebagai representasi waria yogyakarta. Itulah beberapa hal yang merupakan inti dari keberadaan para kelompok Descriptive Representation.



Dari bagan diatas kita dapat melihat beberapa pola diskriminasi yang didapatkan oleh para waria. Dari banyak diskriminasi itulah yang kemudian dibutuhkan aktor atau pihak yang mampu untuk menjadikannya isu publik, sehingga diskriminasi tersebut tidak terulang kembali. Sehingga itulah sebenarnya tugas utama dari Vinolia Wakijo untuk menjembatani antara kepentingan waria dan Negara, atau juga sebaliknya.

Vinolia Wakijo lahir 56 tahun silam di Yogyakarta, anak bungsu dari 6 bersaudara ini dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama Wakijo. Wakijo kecil sudah mulai menunjukkan keanehan dalam dirinya, sebagai seorang

anak laki-laki Wakijo lebih sering bermain dengan perempuan, bermain dengan mainan perempuan, lebih senang menari ketimbang bermain bola, dan banyak lagi, dimana sifat dominan yang ia tunjukan adalah sisi kewanitaan. Hingga ketika ia dewasa ia mulai sadar akan kebiasaan anehnya, bahkan Wakijo kecil sudah mulai merasakan ketertarikan pada laki-laki, bukannya seorang perempuan, bahkan orientasi sexnya pun lebih pada laki-laki.

Hingga ketika ia remaja wakijo meninggalkan rumah karena mendapatkan penolakan atas identitas dan kekurangan yang ia miliki dari keluarganya, terlebih dari kakak laki-lakinya yang terkenal sebagai premannya Yogyakarta di daerah Badran. Hidup di jalanan sebagai waria wakijo mengganti namanya menjadi Vinolia dan tetap menggunakan wakijo di belakang namanya. Selama menjalani profesi sebagai waria banyak pengalaman hidup yang kemudian nanti akan membentuk dirinya seperti saat ini.

Layaknya seorang PSK pada umumnya Mami Vin sering mendapatkan tindakan tidak menyenangkan dari para pelanggannya, mulai dari pelanggan yang tidak mau membayar, bahkan sampai ada pelanggan yang hampir membunuhnya. Dari banyak pengalaman buruk yang Mami Vin alami selama menjadi PSK dan kekerasan serta stigma negatif dari masyarakat kepada para waria membuat Mami Vin memutuskan untuk berhenti menjadi PSK dan berusaha untuk merubah pandangan negatif masyarakat pada para waria.

Sejak tahun 1993 Mami Vin sudah aktif sebagai aktivis HIV dan jadi relawan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) DIY sampai tahun 2005. Mami Vin harus membuat keputusan yang sangat berat, apa tetap berjuang untuk Anak Jalanan dan waria atau fokus pada waria saja. Sulit baginya

untuk meninggalkan anak-anak jalanan dan untuk fokus pada waria. Karena dia merasa waria yang hidup dengan HIV / AIDS membutuhkan perawatan mendesak. Lalu Mami Vin fokus pada penanggulangan HIV/AIDS dikalangan waria, karena prevalensi HIV di kalangan waria cukup tinggi, bahkan waktu itu beberapa waria meninggal dalam waktu 1 bulan.

Pada tahun 2006 Vinolia Wakijo ‘Mami Vin’ mendapatkan bantuan dari UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS) untuk membuat sebuah lembaga sosial dan mendapatkan bantuan dana. UNAIDSS menawarkan diri dan menyarankan ‘Mami Vin’ untuk membuat LSM. Akhirnya berkat dukungan dari UNAIDS dengan 5 teman waria lainnya terbentuklah LSM Kebaya. Dengan dana bantuan yang diberikan UNAIDS. Tidak hanya dengan UNAIDS, LSM kebaya juga pernah bekerjasama dengan Hivos Foundation selama 9 bulan, dan juga Global Found terhitung sampai Maret 2010.

Banyak sekali bantuan dan penghargaan yang didapatkan oleh mami Vin dan LSM Kebaya. Atas konsistensinya tersebutlah membuat mami Vin dan LSM Kebaya selalu menjadi proyek percontohan. Banyak sekali penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh mami Vin untuk merubah pandangan negative dari masyarakat terhadap waria. Mulai dari mengikut sertakan waria dalam kegiatan bermasyarakat, melakukan bakti sosial dalam masyarakat, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam hal penanggulangan HIV/AIDS dan juga penanganan Odha dilakukan oleh mami Vin yang bekerja sama dengan salah satu sahabatnya ketika SD dulu yang menjadi dokter di RS Sarjito. Selain itu sosialisasi pun sering dilakukan oleh LSM Kebaya dengan membagikan kondom gratis hasil dari bantuan Kementerian Sosial.

Pendekatan *Descriptive Representation* dalam penelitian ini dikarenakan aktor utama dalam penelitian ini Vinolia Wakijo (Mami Vin) mewakili kelompok waria di Kota Yogyakarta sebagai orang yang diwakilinya. Pun tujuan dari Mami Vin tersebut juga sangat jelas, ia mencoba memperjuangkan lahirnya karakter dan identitas baru dari waria Yogyakarta yaitu persamaan hak dan layanan dengan masyarakat ber-gender jelas (Pria/Wanita) pada umumnya, salah satunya dalam isu pencegahan dan penanganan waria yang mengidap virus HIV/AIDS. Bagaimana kemudian para waria di Yogyakarta sadar akan bahaya HIV/AIDS, dan apabila ada waria yang positif menderita HIV/AIDS maka dia akan mendapatkan layanan yang sama dan adil dengan masyarakat umum lainnya, merupakan inti dari keberadaan Mami Vin dan juga LSM Kebaya.

Usaha yang kemudian Mami Vin dan LSM Kebaya lakukan adalah dengan sering membuat rangkaian kegiatan yang sifatnya positif dan jauh dari kebiasaan buruk para waria dalam kesehariaannya. Tujuannya adalah dengan membiasakan waria berinteraksi dengan masyarakat umum dan juga membiasakan dan membuat masyarakat peduli akan keberadaan waria. Sehingga Visi LSM Kebaya untuk menurunkan angka infeksi HIV dan penanganan kasus AIDS di kalangan Waria di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Misi LSM Kebaya untuk meningkatkan taraf hidup Waria dengan masyarakat lainnya warganegara Indonesia, dapat dengan mudah tercapai dengan bantuan dari semua pihak. Berikut ini rangkaian kegiatan yang pernah LSM Kebaya jalankan sebagai bentuk merubah stigma negatif waria di masyarakat:⁴

1. Audiensi KEBAYA dengan GKR Hemas

⁴ Kebaya, L. (2009, February 18). Retrieved Desember 5, 2012, from kebaya-jogja.blogspot.com: http://kebaya-jogja.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Audiensi ini diadakan sebagai bagian dari kegiatan Jogja Principal Day. Jogja Principal Day adalah pengenalan prinsip jogjakarta sebagai bagian pengakuan dasar HAM atas keanekaragaman kehidupan di Jogja. Yang terdiri dari Lintas Suku, Lintas Ras, Lintas Agama, Lintas etnis, Lintas orientasi seksual, dan sebagainya.

2. Pengayaan Motivasi Usaha

Kegiatan pengayaan motivasi ini merupakan salah satu agenda pertemuan regional waria di Jogjakarta. Pertemuan regional waria diadakan tiap bulan sekali di sekretariat Kebaya.

3. World AIDS Day 2008

Kegiatan KEBAYA dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia 2008 lalu sebagai salah satu pengisi acara dalam peringatan tersebut.

4. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku

Kegiatan Pelatihan BCC (Komunikasi Perubahan Perilaku) bagi teman-teman Staff Kebaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mentransfer informasi ke mitra strategis serta mencoba melakukan pendekatan ke arah perubahan perilaku.

5. Pelatihan Lay Support

Pelatihan Lay Support ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman staf Kebaya sehingga mempunyai persamaan persepsi tentang bagaimana mendampingi ODHA sekaligus meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap ODHA. Pelayanan lay

support merupakan kegiatan yang berupa pendekatan terhadap Mitra Strategis, konseling, motivasi bagi ODHA dan OHIDHA, treatment bagi yang sudah terapi ARV, dan juga pemberdayaan ekonomi serta kegiatan lain yang sifatnya pendampingan.

6. Kegiatan FKY 2008

Dalam rangka FKY (Festival Kesenian Yogyakarta) bulan Juni 2008 lalu, Kebaya menjadi salah satu peserta yang turut mengisi acara pembukaan yang dibuka oleh Sultan HB X. Kegiatan FKY merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Kebaya telah berpartisipasi dalam acara FKY sejak tahun 2005.

Keinginan dari banyak waria adalah kemudahan mereka untuk masuk ke ranah public, terutama untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah yang selama ini mereka jarang sekali dapatkan. Misalnya, layanan kesehatan, pembuatan KTP (sesuai identitas waria mereka), layanan pendidikan (dimana tidak semua waria dapat memperoleh pendidikan dengan baik dikarenakan identitas warianya tersebut), penyediaan lapangan pekerjaan (sehingga waria tidak perlu bekerja lagi sebagai PSK) dan juga kesamaan dihadapan hukum. Dan yang terpenting adalah bagaimana keberadaan waria dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Dari banyak aspirasi dan kegiatan yang dilakukan oleh LSM Kebaya dan Mami Vin ternyata tidak mampu untuk membuat Negara memperhatikan mereka. Mungkin hanya pada saat pembahasan mengenai penyebaran virus HIV/AIDS pemerintah mau untuk diajak bekerja sama. Baik itu dalam hal sosialisasi, dan juga penanganan pada waria yang positif terjangkit virus tersebut, pemerintah

lebih pada memberikan bantuan materil berupa uang dan kondom tanpa melakukan pendampingan kepada para waria.

Hal yang paling utama adalah bagaimana para waria dapat masuk dan mengakses ke ruang publik, terutama pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan. Ketika ketiganya mereka dapatkan niscaya mereka akan keluar dari lingkaran setan sebagai PSK. Tapi kenyataannya waria masih didiskriminasikan dari semuanya. Bahkan dalam lingkungan masyarakatpun tidak semua waria mampu untuk berinteraksi dengan normal dalam masyarakat. Hanya sebagian kecil, sangat kecil waria yang mampu untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Semua kembali dari bagaimana waria mempresentasikan identitasnya kepada masyarakat umum.

Artinya adalah pengakuan akan keberadaan waria sebagai gender ketiga (diluar laki-laki dan perempuan) ternyata hanya didapatkan oleh waria tertentu, terutama waria yang memiliki prestasi dan juga para elite dari waria tersebut. Semisal contoh apa yang ada dalam LSM Kebaya, pengakuan atas waria sebagai gender ketiga hanya didapatkan oleh Mami Vin. Mami Vin tidak lagi pernah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Kini Mami Vin lebih dipandang sebagai sosok seorang ‘IBU’ ketimbang waria, mami Vin dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dan Negara tanpa ada rasa takut. Karena dia yakin telah diterima dalam masyarakat. Hal tersebut mami Vin dapatkan bukan hanya karena prestasi dan konsistensinya sebagai representasi dari waria dalam penanggulangan dan penyebaran Virus HIV/AIDS dikalangan waria saja, melainkan justru datang dari dirinya yang mampu menampilkan sisi yang berbeda dari waria pada umumnya.

Sebagaimana meminjam teori kekuasaan Pierre Bourdieu sebagai cara untuk melihat bagaimana mami Vin mampu untuk membangun kekuasaannya. Dimana Bourdieu mengatakan bahwa kekuasaan sebagai perjuangan setiap agen (individu, kelompok maupun institusi) dalam mendapatkan berbagai modal dalam sebuah ranah tertentu. Ranah dipahami sebagai sebuah arena social yang didalamnya terdapat perjuangan untuk memperebutkan sumber pertaruhan dengan akses terbatas. Dalam habitus bagaimana melihat orang-orang terpelajar salah satunya dapat dinilai dengan penampilan orang tersebut. Dengan penampilan dapat menentukan apakah seseorang itu terpelajar dan berpendidikan atau tidak. Artinya ada standar yang tidak tercatat atau tertulis yang berlaku dalam masyarakat tentang penampilan seseorang, baik itu cara berpakaian atau bersikap dengan orang lain, contohnya:

1. *Orang Bodoh*, Penampilannya akan cendrung norak dan urak-urakan atau acak-acakan. Selain itu sikap dan prilakunya juga kebanyakan lebih menunjukkan hal yang buruk.
2. *Orang Aneh*, Penampilannya juga akan aneh, selain itu biasanya akan bertentangan dengan kebiasaan yang ada dan terbangun dalam masyarakat.
3. *Orang Terpelajar*, Mampu untuk berpenampilan dan bersikap dengan baik, mampu untuk menyesuaikan situasi dan kondisi dimana dan bagaimana ia harus berpenampilan dan bersikap.

Dan habitus itulah yang dimiliki oleh mami Vin, ia berpakaian dan bersikap tidak seperti waria lain pada umumnya, yang sering masyarakat anggap

sebagai orang bodoh atau orang yang aneh. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mami Vin, dimana ketika ia sering berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang terpelajar seperti, mahasiswa, dosen, anggota dewan, bupati, gubernur dan bahkan menteri. Dari pengalaman dan rutinitas tersebut yang membuat mami Vin secara tidak sadar mengikuti gaya berpenampilan dan bersikap ala orang-orang terpelajar. Dan semua itu terjadi di dalam arena sosial, arena dimana terjadi interaksi antara mami Vin dengan masyarakat umum.

Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran.⁵ Berikut ini merupakan modal yang dimiliki oleh mami Vin yang ia gunakan untuk mendapatkan kekuasaanya, yaitu:

1. Modal Sosial

Modal sosial yang mami Vin miliki berkaitan dengan relasi sosial yang dia lakukan. Dimana relasi tersebut menumbuhkan jaringan-jaringan yang menguntungkan mami Vin. Seperti jaringan kerabat dan persahabatan antara mami Vin dengan salah satu petinggi FPI, yang melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Dan juga tidak lupa adanya jaringan organisasi mami Vin dengan LSM dan lembaga lainnya yang kagum dan percaya akan kemampuan mami Vin, terutama para aktifis HAM sampai kepala daerah.

2. Modal Budaya

Berawal dari modal sosial di atas, yang kemudian membuat mami Vin mendapatkan modal yang lainnya. Diantaranya kemampuan dan

⁵ Bourdieu, P. (2009). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*. (C. M. Richard Harker, Ed.) Yogyakarta: Jalasutra.

prestasinya di dalam organisasi. Kemampuannya untuk mengatur, memerintah dan memimpin waria serta organisasinya, yang kemudian memberikannya pengalaman kepemimpinan sebagai pemimpin dalam LSM Kebaya.

3. Modal Simbolik

Modal ini datang dari kedudukannya sebagai ketua atau pemimpin dari LSM Kebaya yang memang dibentuk tidak terlepas dari perjuangannya selama ini sebagai pemerhati waria. Dan karena LSM ini dibentuk secara legal dan memiliki izin operasional membuat LSM ini dan juga mami Vin mendapatkan dan memiliki otoritas serta legitimate.

Praktik individu atau juga kelompok sosial, karenanya harus dianalisa sebagai hasil interaksi habitus dan ranah.⁶ Artinya praktik ini merupakan keseluruhan proses dari awal sampai akhir, yang kemudian membuktikan dan menunjukkan bagaimana pada akhirnya Mami Vin mendapatkan pengakuan atas keberadaannya dan juga eksistensinya sebagai seorang waria. Dari kemampuan mami Vin mendapatkan kekuasaannya yang kemudian membuat mami Vin mampu mengendalikan masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaannya. Dimana pada saat ini mami Vin justru lebih sering dianggap sorang perempuan ketimbang seorang waria atau bahkan laki-laki. Dan mami Vin juga mampu untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya, sehingga menunjukkan bahwa tidak semua waria adalah penyakit sosial.

⁶ Ibid, hal 18

C. PENUTUP

3.1. Simpulan

Sampai saat ini, masih banyak diskriminasi yang waria dapatkan, terutama dari pemerintah. Baik itu diskriminasi langsung berupa pembatasan bagi kelompok waria untuk mengakses wilayah tertentu seperti daerah permukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan semacamnya. Diskriminasi tidak langsung terjadi melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang menjadi pembatas kelompok waria untuk berhubungan dengan kelompok lain. Sudah banyak perwakilan dan usaha dari para waria agar keberadaan mereka dapat diterima dimasyarakat. Namun semuanya tidak berjalan dengan baik karena Negara sebagai kekuasaan tertinggi tidak tegas terhadap keberadaan waria, apakah menyetujuinya atau menolak keberadaan waria. Keambiguan itulah yang membuat masyarakatpun bingung untuk bertindak, apakah mereka harus menerima mereka dalam lingkungannya atau tidak. Selain itu banyaknya kekerasan yang waria alami, terutama kekerasan fisik dari Ormas-ormas yang bertindak anarkis dan represif terhadap waria juga bagian dari kesalahan Negara yang tidak mampu untuk bertindak tegas.

Usaha akan pengakuan waria sebagai gender ketiga pun berjalan dengan tidak adil, artinya bahwa penerimaan tersebut hanya didapatkan oleh kalangan waria tertentu saja. Terutama waria yang mampu untuk berprestasi tidak hanya di akademik tapi juga dalam bermasyarakat, keberaniaanya dalam berinteraksi dan juga cara berpenampilan yang baik menjadi faktor utama kenapa masyarakat secara tidak sadar menerima keberadaan waria dalam lingkungannya. Sama seperti yang mami Vin lakukan dan dapatkan, atau juga waria lain seperti

Raminten, ataupun Yulianus Rettob Laut yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota Komisioner Komnas HAM..

3.2 SARAN

Pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap keberadaan waria. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan kebingungan di masyarakat. Bahkan diskrimasi pelayanan kesehatan bagi para waria yang terkena virus HIV/AIDS.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (2009). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik.* (C. M. Richard Harker, Ed.) Yogyakarta: Jalasutra.
- Gayanusantara.or.id. 2009. Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian. Di akses pada tanggal 27 Desember 2013.
- Koeswinarno. 2005. Hidup Sebagai Waria. Kanisius. Yogyakarta.
- Kebaya, L. (2009, February 18). Retrieved Desember 5, 2012, from kebaya-jogja.blogspot.com: http://kebaya-jogja.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
- Kompas.com. 10 Mei 2007. Kaum Waria Tuntut Pekerjaan di Sektor Formal. Di akses pada tanggal 8 April 2010
- Landsberg, A. (2009). Memory, Empathy, and the Politics of Identification. *Politic Of Identification* , 1-10.
- Nadia, Z. 2005. Waria Laknat atau Kodrat. Galang Press. Yogyakarta.
- Nuraini, Juliastuti. Intelektual, Gagasan Subaltern, dan Perubahan Sosial. <http://kunci.or.id/articles/intelektual-gagasan-subaltern-dan-perubahan-sosial-oleh- antariksa/>, Rabu, 22 Juli 2009, dilihat 4 Januari 2012.
- Setyaningrum, A. (-). Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam wacana politik poskolonial. *Politik Identitas* , 13.
- Soedijati, Elisabeth Koes. 1995. SOLIDARITAS DAN MASALAH SOSIAL KELOMPOK WARIA (tinjauan tentang sosiologis dunia sosial kaum waria di Kotamadya Bandung). Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat STIE. Bandung.
- Widayanti, T. (2009). *Politik Subaltern "Pergulatan Identitas Waria"*. yogyakarta: Research Center for politicts and Goverment UGM.

